

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber daya manusia dapat dinyatakan sebagai tonggak keberhasilan pembangunan negara, di mana kapasitas sumber daya manusia harus terus menerus maju agar selaras dengan perkembangan ilmu perkembangan dan teknologi. Nyatanya yang terjadi sumber daya manusia di Indonesia mengalami kemajuan yang lambat sehingga kurang mampu bersaing dengan kemajuan IPTEK. Mengatasi permasalahan sumber daya manusia tersebut maka perlu adanya kesadaran, menurut Danim (Angelina, 2014, hlm.615) perlu adanya kesadaran baru untuk berusaha menyiapkan dirinya ke masa depan yang bermutu, baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun penataran dan sejenisnya.

Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) merupakan upaya yang dilakukan suatu lembaga atau organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mengikuti tuntutan yang kian meningkat. Pelatihan pegawai menurut Fahmi (2015, hlm.1809) dianggap semakin penting manfaatnya karena sumber daya manusia adalah harta atau aset berharga yang dimiliki organisasi dan juga yang menentukan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan selain itu, pada instansi pemerintahan adalah karena adanya tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat kemajuan ilmu dan teknologi serta semakin ketatnya persaingan di antara pemberi pelayanan yang sejenis. Berdasarkan pernyataan tersebut pelatihan dapat dinyatakan sebagai jawaban bagi permasalahan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada organisasi atau lembaga. Pelatihan juga merupakan kebutuhan utama bagi pegawai dalam meningkatkan kapasitas diri sebagai upaya untuk bersaing ataupun meningkatkan posisi dalam lingkup kerja atau organisasi.

Keputusan Menteri Sosial RI No. 29 Th. 2003 tentang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesejahteraan sosial atau pekerja sosial, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan (BBPPKS) Region II Bandung merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah (TKSP) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM). BBPPKS Bandung memiliki enam wilayah kerja yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta,

Fitria Marginingsih, 2018

*KAJIAN MODEL EVALUASI PROGRAM KIRKPATRICK PADA
PENYELENGGARAAN DIKLAT SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PEKSOS
TINGKAT AHLI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Barat serta Provinsi Bangka Belitung.

Diklat Sertifikasi Jabatan merupakan salah satu diklat TKSP yang diselenggarakan oleh BBPPKS Bandung, berdasarkan PERMEN RI Nomor 108 Th. 2009 merupakan pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi. Sertifikasi jabatan dilakukan sebagai bentuk penyelesaian kompetensi teknis yang diperlukan dalam suatu jabatan yang disesuaikan dengan jenjang fungsional. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan posisi atau jabatan agar mampu bersaing di tengah himpitan kemajuan zaman.

Pelatihan sebagai jawaban untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di lembaga atau organisasi, namun perlu dilakukan pengujian apakah memang benar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penilaian efektivitas pelatihan merupakan hal yang sangat penting karena pada pelaksanaan pelatihan suatu lembaga atau organisasi telah menanamkan investasi agar produktivitas kerja dapat tetap meningkat. Pengujian efektivitas diklat dilakukan melalui penilaian terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu sendiri sesuai dengan tujuan pelaksanaan diklat yang dilakukan. Tujuan pelaksanaan diklat menurut UU No 13 Th. 2003 merupakan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut maka sebuah pelatihan dapat dinyatakan berhasil jika telah meningkatkan atau mengembangkan kompetensi, peserta, produktivitas, kedisiplinan, sikap serta etos kerja pada peserta sesuai dengan harapan lembaga atau organisasi pengampunya.

Evaluasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menguji efektivitas pelaksanaan diklat, yang telah dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan juga dampak diklat pada peserta. Evaluasi pelatihan dilakukan dengan pengumpulan data terkait realisasi pelaksanaan program yang diselenggarakan secara sistematis, dengan melibatkan beberapa unsur pelatihan meliputi peserta, fasilitator serta penyelenggara pelatihan dalam pengambilan suatu kebutuhan. Evaluasi mengalami berbagai perkembangan dalam kajian keilmuan sebagai bentuk

Fitria Marginingsih, 2018

*KAJIAN MODEL EVALUASI PROGRAM KIRKPATRICK PADA
PENYELENGGARAAN DIKLAT SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PEKSOS
TINGKAT AHLI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

pengambilan keputusan terhadap hasil dari program yang dilaksanakan yang kemudian akan menghasilkan keputusan terkait keberlangsungan program yang diselenggarakan dihentikan, dilanjutkan atau ditingkatkan kembali. Wirawan (2012, hlm. 17) evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar terkait program.

Baird (2017, hlm. 2) menyatakan bahwa “*program evaluation shows that most training programs have a success rate in change practice*”. Sejalan dengan hal tersebut Muldovan (2015, hlm. 1185) menyatakan bahwa “*Kirkpatrick described four levels of evaluation in which the complexity of the behavioral change increases as evaluation strategies ascend to each higher level.*” Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa model evaluasi dapat dinyatakan berhasil bila dapat menunjukkan peningkatan terhadap praktik yang diterapkan oleh alumni diklat dan juga terjadi perubahan perilaku sebagai *outcome* terhadap diklat yang telah dilaksanakan.

Evaluasi pada diklat tidak akan terlepas dari model evaluasi di mana model evaluasi dapat menentukan seberapa detail penilaian efektivitas pada pelatihan yang dilakukan. Model evaluasi menurut Sudjana (2008, hlm. 52) yang membagi model evaluasi menjadi enam kategori meliputi; 1) model evaluasi program yang terfokus pada pengambilan keputusan, 2) model evaluasi terhadap unsur-unsur program, 3) model evaluasi terhadap jenis / tipe kegiatan program, 4) model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program, 5) model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program, 6) model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program.

Model evaluasi yang terbagi kedalam enam kategori sebagai bentuk pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pada dasarnya evaluasi pelatihan rata-rata lebih memfokuskan pada pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan. Tulung (2014, hlm.1-16) dalam penelitiannya menggunakan model evaluasi CIPP (*context, input, process, product*) dalam pelaksanaan evaluasi terhadap DIKLATPIM ekselon IV departemen keagamaan, hasil penelitiannya menyatakan bahwa penilaian diklat dilakukan dengan menilai landasan serta tujuan pelaksanaan pelatihan, peserta diklat,

Fitria Marginingsih, 2018

**KAJIAN MODEL EVALUASI PROGRAM KIRKPATRICK PADA
PENYELENGGARAAN DIKLAT SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PEKSOS
TINGKAT AHLI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

widyaiswara, kurikulum dan jadwal, pelaksanaan, serta hasil yang hanya ditinjau dari penilaian tes kemampuan akhir peserta dan penilaian terhadap penyelenggara dan widyaiswara dengan melihat nilai rata-rata angka nilai dari semuanya.

Penelitian terhadap evaluasi juga dilakukan oleh Badu (2013, hlm.1-28) di mana penelitian yang dilakukan menggunakan model Kirkpatrick dalam evaluasi perkuliahan yang dilakukan, evaluasi ini dilakukan dengan memfokuskan pada sasaran penelitian yang dinilai terkait hasil dari matakuliah yang dilakukan secara menyeluruh di mana penilaiannya tidak hanya menggunakan tes seperti biasanya juga menggunakan penilaian kinerja untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara menyeluruh menggunakan rubrik penilaian.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut maka dapat di simpulkan bahwa penilaian efektivitas diklat dilakukan melalui evaluasi, pemilihan model evaluasi dilakukan untuk menentukan tujuan atau fokus penilaian yang dilakukan. Model evaluasi CIPP berdasarkan penilitaian Tulung lebih fokus kepada pelaksanaan evaluasi, oleh karenanya evaluasi yang dilakukan hanya sebagai hasil pelaksanaan evaluasi berupa peningkatan pengetahuan yang di ukur melalui perbandingan nilai tes awal dan akhir saja. Penelitian Badu dengan menggunakan model evaluasi Kirkpatrick melakukan penilaian yang lebih komprehensif terkait kinerja mahasiswa karena penilaian yang dilakukan tidak hanya kemampuan saja tetapi lebih terhadap kinerja dari subjek penelitian.

Perbandingan dua peneliatan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa model evaluasi Kirkpatrick ini bukan hanya menilaian proses tetapi lebih pada dampak dalam aplikasi kerja di lingkup kerja peserta melaui evaluasi pasca diklat. Hanya saja model evaluasi Kirkpatrick ini jarang digunakan karena, lamanya proses yang dilakukan serta membutuhkan biaya yang lebih banyak dalam pelaksanaannya, padahal jika di tinjau dari hasil evaluasi yang didapatkannya tentu akan lebih faktual dalam mengukur efektivitas diklat yang dilakukan.

Berdasarkan *studi* pendahuluan yang dilakukan di BBPPKS Bandung pada pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli pada tahun 2016 yang terdiri dari 30 orang peserta yang berasal dari enam wilyah kerja BBPPKS Bandung, kemudian pada pertengahan 2017 dilakukan evaluasi manfaat diklat pada alumni diklat sertifikasi jabatan fungsional tingkat ahli tahun 2016.

Fitria Marginingsih, 2018

**KAJIAN MODEL EVALUASI PROGRAM KIRKPATRICK PADA
PENYELENGGARAAN DIKLAT SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PEKSOS
TINGKAT AHLI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Evaluasi manfaat dilaksanakan oleh bidang program dan evaluasi pada seleksi pemantauan dan evaluasi. evaluasi pada diklat sertifikasi jabatan fungsional tingkat ahli meliputi, evaluasi widyaiswara, evaluasi peserta diklat, evaluasi penyelenggaraan, evaluasi pembelajaran dan evaluasi kebermanfaatannya. Evaluasi widyaiswara dilaksanakan selama diklat yakni usai pembelajaran, evaluasi peserta dilakukan oleh widyaiswara dan petugas yang mengamati setiap peserta dalam proses pembelajaran juga dilakukan oleh rekan selama diklat yang dilakukan setiap hari, evaluasi pembelajaran dilakukan dengan memberikan pre tes, post tes serta ujian yang dilakukan oleh dinas sosial pada akhir pembelajaran sebagai rujukan dalam memberikan kualifikasi bagi peserta, evaluasi kebermanfaatannya dilakukan melalui monev (monitoring dan evaluasi) yang dilaksanakan serempak dengan diklat yang di laksanakan dalam satu tahun pada pertengahan tahun berikutnya.

Evaluasi yang dilakukan di BBPPKS Bandung, tentunya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, efektivitas waktu pelaksanaan, aspek evaluasi serta responden. Beberapa poin tersebut menjadi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan evaluasi pada diklat sertifikasi jabatan fungsional pekerja sosial tingkat ahli. Permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan evaluasi program diklat sertifikasi jabatan fungsional pekerja sosial tingkat ahli, dapat mengasumsikan penelitian yang hendak diteliti terkait **“KAJIAN MODEL EVALUASI PROGRAM KIRKPATRICK PADA PENYELENGGARAAN DIKLAT SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PEKSOS TINGKAT AHLI”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yang didapatkan, meliputi:

1. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Tingkat Ahli bagi pekerja sosial hanya dilakukan di BBPPKS Bandung sehingga, banyak Pekerja Sosial yang diluar wilayah regional banyak yang belum mendapatkan pendidikan dasar yang sesuai standar pelayanan .
2. Evaluasi program Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Peksos Tingkat Ahli dilaksanakan oleh dua bidang yang berbeda, yaitu bidang diklat terkait evaluasi pembelajaran dan penyelenggaraan, bidang program dan evaluasi terkait evaluasi manfaat diklat sehingga tidak terjadi kepaduan dalam penentuan model evaluasi yang digunakan.

Fitria Marginingsih, 2018

*KAJIAN MODEL EVALUASI PROGRAM KIRKPATRICK PADA
PENYELENGGARAAN DIKLAT SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PEKSOS
TINGKAT AHLI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

3. Instrumen yang digunakan memiliki masa berlaku yakni selama tiga tahun dan akan dilakukan review instrumen evaluasi, review yang dilakukan tiga tahun sekali ini dirasa kurang efektif karena dalam penilaian kemampuan peserta dapat terjadi kebocoran sehingga biasa saja peserta sudah mengetahui soal yang di ujikan.
4. Pelaksanaan evaluasi diklat dilakukan dengan cara penyebaran angket setiap hari, sehingga peserta merasakan jenuh karena instrumen yang diberikan tidak jauh berbeda tak jarang juga peserta mengisi instrumen yang diberikan tidak lengkap dan bahkan tidak di isi.
5. Penilaian terhadap pelaksanaan diklat yang dilakukan sebagai upaya evaluasi reaksi yang dilakukan pasca diklat dirasakan kurang efektif dan relevan, mengingat instrumen yang diberikan berupa instrumen terbuka dan hanya menyajikan hasil data berupa saran terkait diklat yang telah dilaksanakan.
6. Evaluasi kemampuan belajar peserta dilakukan sebanyak tiga kali, yakni tes kemampuan awal, tes kemampuan akhir dan ujian. Pelaksanaan tes kemampuan awal peserta dilakukan sebelum pembukaan namun ada beberapa peserta diklat yang telat sehingga baru melaksanakan tes kemampuan awal pada saat dilaksanakannya diklat sehingga telah mendapatkan pembelajaran sebelumnya.
7. Penilaian sikap dilakukan pada proses pelaksanaan diklat dan pasca diklat, penilaian yang dilakukan pada pasca diklat kurang spesifik sehingga perubahan sikap yang dijadikan sebagai hasil tertinggi pada diklat tidak signifikan.
8. Evaluasi manfaat diklat dilakukan dengan cara penyebaran angket dengan tiga jenis responden yakni pimpinan, alumni serta penerima manfaat, tetapi dalam penilaian ini hanya dilakukan satu tahun sekali sehingga grafik perkembangan manfaat diklat kurang begitu terlihat.
9. Rekomendasi hasil evaluasi program hanya terfokus pada perbaikan pelayanan dan sarana prasarana penunjang diklat saja, tidak memberikan pembaharuan pada program Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli pada tahun selanjutnya.

Hasil identifikasi masalah di atas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut: **Bagaimana Kajian Model Evaluasi Program Kirkpatrick pada Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli**, untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Fitria Marginingsih, 2018

*KAJIAN MODEL EVALUASI PROGRAM KIRKPATRICK PADA
PENYELENGGARAAN DIKLAT SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PEKSOS
TINGKAT AHLI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana rancangan evaluasi model Kirkpatrick yang digunakan pada Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Peksos Tingkat Ahli?
2. bagaimana penerapan evaluasi model Kirkpatrick pada Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Peksos Tingkat Ahli?
3. Bagaimana penyusunan laporan hasil evaluasi pada Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Peksos Tingkat ahli?
4. Bagaimana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pada Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Peksos Tingkat Ahli?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pertanyaan penelitian yang di paparkan maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan rancangan evaluasi model Kirkpatrick pada Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Peksos Tingkat Ahli.
2. Mendeskripsikan penerapan evaluasi model Kirkpatrick pada Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Peksos Tingkat Ahli.
3. Mendeskripsikan penyusunan laporan evaluasi model Kirkpatrick pada Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Peksos Tingkat Ahli.
4. Mendeskripsikan tindak lanjut hasil evaluasi program Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Peksos Tingkat Ahli .

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan rujukan ilmu pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Tingkat Ahli.
2. Secara praktis, peneltiaan ini dijadikan referensi keilmuan bagi penelitian yang lebih lanjut. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian yang lebih lanjut, setelah mendapatkan teori dan konsep dalam penelitian ini. Bagi lembaga BBPPKS Regional II hasil penelitian ini menjadi tahu terkait model evaluasi program yang digunakan.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika dalam penelitian ini disusun dengan merujuk pada peraturan Rektor UPI Nomor 5804/UN40/HK/2015 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI Tahun Akademik 2015 sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Fitria Marginingsih, 2018

*KAJIAN MODEL EVALUASI PROGRAM KIRKPATRICK PADA
PENYELENGGARAAN DIKLAT SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PEKSOS
TINGKAT AHLI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Bab ini akan menyajikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan atau struktur organisasi skripsi.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tinjauan teoritis yang menjadi landasan dan acuan dalam analisis pembahasan masalah penelitian. Adapun teori-teori yang di muat dalam penelitian ini adalah konsep pendidikan luar sekolah, konsep pelatihan, dan konsep kepemimpinan.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode atau prosedur penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yang mencakup metode dan desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data dan isu etik.

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan

Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai hasil temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian. Pembahasan dalam bab ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

5. Bab V Simpulan dan Rekomendasi

Pada pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI (2015, hlm. 38) dijelaskan bahwa “bab ini berisi simpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut”.